

PERAN NILAI TUKAR PETANI DAN NILAI TUKAR KOMODITAS DALAM UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI PADI DI PROVINSI JAMBI

ROLE OF FARMERS AND EXCHANGE COMMODITY EXCHANGE IN RICE FARMERS WELFARE IMPROVEMENT EFFORTS IN JAMBI PROVINCE

Sayid Syekh

Balitbangda Provinsi Jambi

Jl. R.M.Noor Admadobrata Telanai Pura Jambi.

Diterima: 23 Oktober 2013; direvisi: 2 November 2013; disetujui: 18 November 2013

Abstrak

Berdasarkan tujuan utama pembangunan pertanian dalam hal ini, yaitu untuk meningkatkan makmur petani dan kehidupan petani, perannya berada di: 1) pengaturan dan dibangun di "PDB"; 2) meningkatkan pendapatan negara; 3) memberikan kesempatan kerja, khususnya bagi petani dan petani. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: (a) menggambarkan kinerja agribisnis padi, (b) menganalisis jangka beras perdagangan, (c) faktor yang mempengaruhi pada hal perdagangan, (d) mengidentifikasi dampak pembangunan pertanian pada petani *terms of trade* dan beras hal perdagangan. Hasil penelitian ini antara lain: 1) biaya untuk pembelian input lebih kecil dibandingkan dengan istilah yang buruh perdagangan; 2) rasio R/C pengembangan usahatani padi menunjukkan bermanfaat dalam skala besar; 3) mengadopsi teknologi pertanian padi, masukan produksi dan tingkat produktivitas yang seperti faktor internal; 4) sistem pasar adalah seperti eksternal, pengaruh terhadap posisi tawar petani. Oleh karena itu dalam rangka memenuhi tujuan itu dan untuk memenuhi aturan-aturan, dalam perumusan berbagai kebijakan, kondisi perdagangan dan beras *terms of trade* digunakan untuk menjadi salah satu pertimbangan utama. Kata kunci: Ketentuan Perdagangan, Beras, Kesejahteraan Petani

Abstract

Based on the main objective of agricultural development in this case, which are to increase the prospering of farmers and peasants life, its role are in: 1) setting and built in the "PDB"; 2) increasing the state income; 3) providing the job opportunities, especially for farmers and peasants. The objectives of this research were to: (a) describe rice agribusiness performance; (b) analyze rice term of trade; (c) influencing factors on terms of trade; (d) identifying the agricultural development impact on farmers terms of trade and rice terms of trade. The result of this study among other things: 1) the cost for purchasing inputs was smaller compared to that labor's terms of trade; 2) the R/C ratio of rice farming development showed beneficial in large scale; 3) adopted rice farming technology, production input and productivity level were such of internal factors; 4) market system was such of external, influence for farmer's bargaining position. Therefore in order to meet that objective and to fulfill those rules, in formulation of many policies, the terms of trade and rice terms of trade is used to be one of main considerations.

Keywords: Terms of Trade, Rice, Prosperity of Farmer

PENDAHULUAN

Sebagai negara yang mayoritas penduduknya hidup dari sektor pertanian, Indonesia selalu memprogramkan pembangunan pertanian dengan hakekatnya bertujuan demi kesejahteraan masyarakat petani baik sekedar mampu mencukupi kebutuhan subsisten yang terasa semakin sulit maupun demi peningkatan kesejahteraan petani itu sendiri. Indonesia pernah mengalami tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi (sekitar 7 % per tahun)

dalam PJPT I yang lalu. Pada masa tersebut terjadi keberhasilan pencapaian ketersediaan pangan, transformasi struktur ekonomi, berkembangnya sektor industri dan jasa yang banyak menyerap tenaga kerja menyebabkan tingginya peralihan peran sektor pertanian ke sektor non-pertanian, pergeseran dari migas ke non-migas. Kondisi ini (Simatupang, P. 1992) menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan hubungan sinergis dengan sektor lain.

Masih tersisanya masalah yang belum

terselesaikan dari pelaksanaan pembangunan periode lalu masih bertambah sebagai konsekuensi perubahan pola kebijakan pemerintah dan perubahan lingkungan strategis baik global maupun domestik serta berbagai dampak akibat krisis ekonomi yang makin terasa berat belakangan ini terutama bagi kalangan masyarakat menengah ke bawah. Terlepas dari keberhasilan yang pernah dicapai dan peran strategis sector pertanian seperti tersebut diatas, tantangan pembangunan pertanian saat ini dan di masa mendatang juga terasa semakin berat.

Pembangunan pertanian telah memberikan sumbangan dalam keberhasilan pembangunan nasional, seperti dalam pembentukan PDB, penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, perolehan devisa melalui ekspor dan penekanan inflasi (Bunasor, 1997: Simatupang, P. 1992); dimana gerakannya diantisipasi dan diselaraskan searah dengan dinamika pembangunan yang terjadi.

Sejak pelita VI orientasi pembangunan pertanian beralih dari fokus peningkatan produksi semata ke arah orientasi pendapatan (kesejahteraan) masyarakat pertanian, terutama pertanian di pedesaan. Untuk itu pengembangan agribisnis telah menempati posisi sentral pembangunan pertanian (Baharsyah, 1991). Sebagai relevansinya adalah upaya memberi masukan bagi pelaksanaan pembangunan pertanian selanjutnya dengan mengkaji dampak kebijaksanaan tersebut di tingkat mikro dan makro terhadap perbaikan kesejahteraan kaum petani.

Untuk melihat dinamika tingkat kesejahteraan petani, salah satu alat bantu ukurnya adalah NTP (Nilai Tukar Petani) dan NTKP (Nilai Tukar Komoditas Pertanian), dimana peningkatan nilai tukar tersebut diharapkan mampu mengindikasikan peningkatan kesejahteraan masyarakat pertanian maupun keadaan sebaliknya. NTP berkaitan dengan kemampuan dan daya beli petani dalam membiayai hidup rumah tangganya. NTKP berkaitan dengan kekuatan dari daya tukar ataupun daya beli dari suatu komoditas pertanian terhadap komoditas/produksi lain yang dipertukarkan.

Keberhasilan pembangunan pertanian yang pernah dicapai tidak dapat dipungkiri, telah diikuti pula oleh perubahan secara struktural pada sektor perekonomian nasional, yang mana peran sector pertanian semakin menurun digeser oleh peran sector industri; dimana tersirat pula adanya beban berat dari sector pertanian. Hal ini terutama berkaitan dengan semakin melebarnya kesenjangan antara sector pertanian dengan sector di luar pertanian, serta penurunan nilai tukar pertanian yang disebabkan penurunan nilai tukar komoditas pertanian.

Krisis moneter yang turut memicu krisis ekonomi berpengaruh negatif yang salah satu

dampaknya terlihat dengan meningkatnya pengangguran (yang umumnya berasal dari tenaga kerja pedesaan) dan jumlah penduduk miskin. Pengaruh positif dengan salah satu dampaknya terlihat pada meningkatnya harga komoditas pertanian baik harga produk maupun harga beli input oleh petani. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya nilai tukar mata uang asing (US dollar).

Apabila daya beli petani karena pendapatan yang diterima dari kenaikan harga produksi pertanian yang dihasilkan, lebih besar dari kenaikan harga barang yang dibeli, maka hal ini mengindikasikan bahwa daya dan kemampuan petani lebih baik atau tingkat pendapatan petani lebih meningkat. Alat ukur daya beli petani selintas dapat menunjukkan tingkat kesejahteraannya dirumuskan dalam bentuk Nilai Tukar Petani (NTP) yang terbentuk oleh keterkaitan yang kompleks dari suatu system pembentuk harga, baik yang harga yang diterima maupun harga yang dibayar petani. Dengan kata lain, Nilai tukar Petani dapat didefinisikan sebagai nisbah antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar oleh petani, sehingga merupakan ukuran kemampuan daya tukar produk yang dihasilkan terhadap produk dan jasa yang mampu dibeli rumah tangga petani, baik untuk biaya input usaha tani maupun biaya konsumsi rumah tangga petani.

Berbagai fenomena perubahan situasi (gejolak) yang terjadi baik yang bersifat alami (seperti gejolak produksi pertanian) maupun gejolak yang terjadi akibat adanya distorsi pasar (seperti penerapan kebijaksanaan yang disengaja, baik di sector pertanian dan non-pertanian, di tingkat mikro maupun makro), akan mempengaruhi harga-harga, yang pada gilirannya akan mempengaruhi nilai tukar petani, akan menjadi masukan penting bagi penyusunan program kebijaksanaan ke arah pembentukan nilai tukar yang diinginkan. Keadaan ini dapat mengindikasikan bahwa kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah dari awal yang terkait dengan input produksi usaha tani sampai pada pemasaran hasil produk pertanian (antara lain: kebijaksanaan harga input dan output, subsidi, modal/perkreditan dan lainnya) akan mempengaruhi nilai tukar petani secara langsung maupun tidak langsung.

Fluktuasi nilai tukar petani akan menunjukkan fluktuasi kemampuan pembayaran ataupun tingkat pendapatan riil petani. Menurut Killick (1983), Timmer et al. (1983), kegiatan pertanian tentu saja tidak lepas dari kegiatan di luar sector pertanian, dengan demikian nilai tukar petani juga dipengaruhi oleh peran dan perilaku di luar sector pertanian. Perbaikan dan peningkatan nilai tukar petani yang mengindikasikan peningkatan kesejahteraan petani akan terkait dengan keagairahan petani untuk

berproduksi. Hal ini akan berdampak ganda (Supriyati et al., 2000) tidak saja dalam peningkatan partisipasi petani dan produksi pertanian dalam menggairahkan perekonomian pedesaan, penciptaan lapangan pekerjaan di pedesaan dan menumbuhkan permintaan produk non-pertanian; tetapi juga diharapkan akan mampu mengurangi perbedaan (menciptakan keseimbangan) pembangunan antar daerah (desa-kota), maupun antar wilayah serta optimalisasi sumberdaya nasional.

Keragaman penerimaan, pengeluaran dan nilai tukar petani antar daerah dan waktu dipengaruhi oleh mekanisme pembentukan dalam sistem nilai tukar petani yang berbeda antar daerah dan antar waktu sebagai akibat dari keragaman system pembentukan penawaran dan penerimaan. Dari sisi penerimaan petani, keragaman antar daerah dan waktu terjadi berkaitan dengan keragaman sumberdaya dan komoditas yang diusahainya serta diversifikasi sumber pendapatan lain. Keragaman pengeluaran petani terkait dengan keragaman pola konsumsi petani antar daerah dan waktu. (Supriyati et al, 2000).

Pelaksanaan maupun keberhasilan pembangunan telah menumbuhkan keragaman pada sumber pendapatan dan pola/kebutuhan konsumsi baru. Sumber pendapatan petani tidak lagi semata berasal dari usaha tani dan buruh tani (on farm dan off farm), tetapi berkembang dari kegiatan non-pertanian (non-farm). Hal ini berkaitan dengan faktor pendorong yang berasal dari dalam diri petani untuk berusaha di luar sektor pertanian karena tidak/kurang mampunya sektor ini (on farm dan off farm) mencukupi kebutuhan konsumsi yang kian meningkat dan bervariasi. Faktor penarik yang berasal dari luar petani berkaitan dengan makin terbukanya peluang pekerjaan di luar sektor pertanian yang dirasa lebih nyaman dan lebih menjanjikan untuk meningkatkan taraf penghasilan dan penghidupan bagi petani.

Besar kecilnya proporsi pendapatan rumah tangga petani dari sektor pertanian akan mempengaruhi besar kecilnya kekuatan nilai tukar pertanian bagi petani yang berkaitan erat dengan peran pertanian dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga petani. Perbedaan peran proporsi pertanian selain dipengaruhi dan terkait menurut kelompok masyarakat, antara petani berlahan luas dengan berlahan sempit dan buruh tani, juga dipengaruhi oleh tingkat profitabilitas usaha pertanian, kekuatan/kemampuan pasar dan kebijaksanaan pemerintah. Dengan demikian mekanisme kompleks dari sistem permintaan, penawaran dan kebijaksanaan akan berpengaruh dalam pembentukan nilai tukar pertanian. Pembentukan harga tidak semata ditentukan oleh sector pertanian, tetapi juga oleh perilaku sector di luar pertanian baik sektor riil, fiskal, maupun moneter. (Killick, 1983; Timmer et al, 1983).

Beranjak dari dukungan terhadap program yang telah dilaksanakan Pemerintah Provinsi Jambi, kemudian ditentukan perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Perilaku Nilai Tukar Petani (NTP);
2. Bagaimana Perilaku Nilai Tukar Komoditas Pertanian (NTKP) yang masing- masing menurut luas garapan;
3. Bagaimana menganalisa faktor-faktor yang menentukan NTP dan NTKP;
4. Bagaimana menganalisa dampak dari kebijaksanaan pembangunan pertanian terhadap NTP dan NTKP.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk melihat bagaimana Perilaku Nilai Tukar Petani (NTP);
2. Untuk melihat bagaimana Perilaku Nilai Tukar Komoditas Pertanian (NTKP) yang masing-masing menurut luas garapan;
3. Untuk melihat dan menganalisis bagaimana faktor-faktor yang menentukan NTP dan NTKP;
4. Untuk melihat dan menganalisis bagaimana dampak dari kebijaksanaan pembangunan pertanian terhadap NTP dan NTKP.

METODE PENELITIAN

Komoditas dalam penelitian ini adalah: padi. Dengan memilih beberapa daerah di Provinsi Jambi sebagai lokasi penelitian, dengan latar belakang bahwa daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kerinci dikenal sebagai salah satu daerah sentra produksi komoditas padi.

Penentuan dan pemilihan petani responden dilakukan secara acak dengan berdasarkan pada strata kepemilikan/pengusahaan lahan untuk komoditi padi yang kisaran antara 0,25 ha < n < 1 ha sebanyak 60 petani.

Metode analisa secara garis besar adalah sebagai berikut: (1) Keragaan perilaku nilai tukar pendapatan/penerimaan komoditas pertanian; (2) Analisa faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan harga sebagai pendekatan analisa kebijaksanaan pembangunan pertanian; (3) Analisa nilai tukar pendapatan.

$$NTI = P_x Q_x / P_y Q_y$$

Dimana:

NTI adalah menggambarkan tingkat profitabilitas usaha tani komoditas tertentu, belum mencakup keseluruhan komponen pendapatan dan pengeluaran petani, hanya menggambarkan nilai tukar komodits tertentu.

$HKOM_{jt} = f(\text{PRKOM}_{jt}, \text{INF}_{t})$

Dimana:

$HKOM_{jt}$ adalah harga komoditas j pada waktu t .

PRKOM_{jt} adalah produksi komoditas j pada waktu t

INF_{t} adalah inflasi pada waktu t (diproksi dengan IHK pedesaan).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keragaan Agribisnis Padi

Padi adalah salah satu komoditi budidaya terpenting bagi peradapan manusia. Meskipun mengacu pada tanaman komoditas budidaya, padi juga mengacu pada beberapa jenis marga (genus) yang sama disebut padi liar. Produksi padi dunia menempati urutan ketiga pada semua sereal setelah jagung dan gandum.

Provinsi Jambi berpotensi sebagai daerah sentra produksi padi dan berpeluang mengembangkannya untuk memenuhi permintaan konsumsi dalam negeri maupun ekspor. Salah satunya adalah Kabupaten Kerinci, yang dipilih sebagai lokasi contoh karena merupakan sentra produksi padi terbesar, dilihat dari luas tanam dan produksinya. Data setelah tahun 2010 terealisasikan dengan luas panen 37.131 ha, rata-rata produktivitas 14,99 kw/ha dan produksi 55.659 ton, melebihi dari target semula dengan luas panen 32.000 ha, rata-rata produktivitas 14,41 kw/ha dan produksi 46.112 ton.

Subsistem Produksi

Perbaikan teknologi seperti; pemilihan benih yang cocok lokasi dan berkualitas serta relatif tahan hama/penyakit, pengapuran dan perbaikan hara perlu dilakukan untuk mencapai peningkatan produktivitas

dan efisiensi usaha tani padi. Hal ini bertujuan agar usaha tani padi mampu memberikan daya tarik, motivasi dan insentif bagi petani untuk mengusahainya, dengan menerapkan teknologi budidaya dan pengelolaan sistem produksi yang efektif dan efisien serta dukungan eksternal. Cakupannya seperti ketersediaan sarana dan prasarana produksi, penyediaan fasilitas kredit, kemudahan dan kejelasan pemasaran produk dengan system yang lebih efektif dan efisien serta yang terpenting adalah penyuluhan dan pembinaan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesiapan petani dalam mengadopsi teknologi (Sayaka, dkk., 1992: Ekonomi Kedele 1996).

Produktivitas padi per hektar yang berbeda baik dalam agroekologi yang sama apalagi bila berbeda, dikarenakan perbedaan adopsi pengetahuan dan teknologi (masih rendah) dan manajemen di tingkat petani. Intensitas kendala ini berbeda dan tergantung antar daerah dan wilayah pengusahaannya. Untuk itu diperlukan penelitian adaptif untuk mendapatkan dan menguji keberhasilan teknologi yang spesifik serta tepat lokasi. Hal ini dibutuhkan dalam pengkajian pengembangan sistem produksi berkelanjutan di masa mendatang termasuk pemilihan dan penggunaan benih bermutu dari varietas-varietas unggul yang cocok dan berpotensi hasil tinggi serta dengan mudah dan kontiniu dapat diperoleh petani.

Faktor sosial ekonomi turut sebagai faktor penentu tercapainya produktivitas dimana petani umumnya akan membandingkan kemudahan dan keuntungan yang akan diperoleh, terpenuhi atau tidaknya kebutuhan hidup bila ia lebih memilih menanam padi dibanding komoditas lain.

Tabel 1. Analisa Biaya, Pendapatan Usaha tani Padi, berdasarkan Luas Garapan.

Uraian	MT II - 2009		MT I - 2010	
	Luas Garapan		Luas Garapan	
	Sedang	Luas	Sedang	Luas
I. Biaya (Rp. 000,-)	1.029,25	2.026,00	914,00	1.769,50
1. Sarana Produksi	331,25	637,50	329,00	602,50
1.1. Bibit	75,00	150,00	100,00	187,50
1.2. Pupuk				
• Urea	82,50	165,00	99,00	165,00
• SP-36	26,25	52,50	35,00	70,00
• KCl	22,50	45,00	-	-
1.3. Obat-obatan	125,00	225,00	95,00	180,00
2. Tenaga kerja				
2.1. Pra panen s/d panen	648,00	1.246,00	505,00	1.025,00
2.2. Pasca Panen	50,00	97,00	50,00	97,00
3. Lainnya (pengairan)	30,00	45,00	30,00	45,00
II. Penerimaan (Rp. 000,-)	1.350,00	2.790,00	1.170,00	2.340,00
III. Keuntungan	320,75	764,00	256,00	570,50
IV. R/C	1,31	1,38	1,28	1,32

Sumber: Analisis Data Primer.

Analisa usaha tani dilakukan menurut strata luas garapan yang diusahai petani di lokasi penelitian yaitu: lahan sedang (0,2 ha – 0,5 ha) dan lahan luas (0,5 ha – 1 ha).

Dari nilai R/C pada Tabel 1 di atas, terlihat bahwa usaha tani padi cukup menguntungkan. Pada garapan sedang, nilai R/C sebesar 1,31 dan 1,38 untuk garapan luas pada musim tanam MK II tahun 2009. Pada musim tanam MK I tahun 2010, nilai R/C sebesar 1,28 untuk garapan sedang, untuk garapan luas sebesar 1,32.

Penurunan nilai R/C yang terjadi, bisa saja dipengaruhi oleh berkurangnya luas tanam yang berakibat berkurangnya luas panen pada tahun 2010, dan bisa juga disebabkan oleh lebih meluasnya serangan hama/penyakit pada luas areal tanam yang sama, yang disebabkan meningkatnya harga obat-obatan sehingga para petani mengurangi pemakaiannya. (lihat Tabel 1, sub obat-obatan).

Pada struktur biaya usaha tani padi di daerah penelitian, proporsi terbesar adalah biaya tenagakerja, yang berkisar antara 60,7% sampai dengan 67,82% dari total biaya. Hal ini mencerminkan sudah sulitnya mencari tenagakerja, yang menyebabkan tingginya upah tenagakerja di daerah tersebut.

Subsistem Faktor Penunjang

Faktor harga merupakan permasalahan utama bagi petani yang berkaitan dengan permodalan dan mempengaruhi kelanjutan usaha taninya. Pembentukan KUB (Kerja Usaha Bersama) dirintis dengan membangun semacam kemitraan antara

petani dan pedagang, namun pengembangannya masih terbentur pada keterbatasan modal.

Peran pemerintah yang besar sebagai salah satu faktor penunjang dalam penyediaan fasilitas/prasarana umum seperti: jalan untuk transportasi, pengairan, komunikasi dan publikasi, serta pengendalian dan pengawasan harga dan pemasaran.

Faktor lainnya yang tak kalah penting adalah peran pembinaan dan penyuluhan teknologi serta pelatihan yang perlu ditingkatkan untuk turut menunjang terserapnya teknologi yang adaptif.

Turut direlisasikannya program Gema Palagung (Gerakan Mandiri Padi, Kedelai dan Jagung) merupakan salah satu program di antara berbagai program pemerintah sebagai upaya khusus yang diharapkan mampu menanggulangi dan merupakan upaya meningkatkan ketersediaan pangan nasional untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri serta upaya untuk mengurangi impor, yang berkaitan pada penurunan terhadap permintaan devisa.

Nilai Tukar Penerimaan Komoditas Padi dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya

Nilai tukar penerimaan usaha tani dapat diartikan sebagai rasio antara penerimaan dari komoditas terhadap biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi komoditas tersebut. Dari nilai tukar penerimaan dapat diketahui tingkat profitabilitas suatu usaha tani.

Dari Tabel 2 dan Tabel 3, dapat diketahui bahwa nilai tukar penerimaan petani yang areal garapannya luas akan lebih baik dari nilai tukar penerimaan petani yang areal garapannya sedang,

Tabel 2: Analisis Nilai Tukar Penerimaan Komoditas Padi Berdasarkan Tingkat Pendapatan dan Areal Garapan.

Uraian	MT II 2009					
	Areal Garapan Sengah			Areal Garapan Luas		
	Rendah	Sengah	Tinggi	Rendah	Sengah	Tinggi
I. Biaya (Rp. 000,-)	926,00	1.062,75	1189,00	1.742,50	2.016,00	2.317,75
1. Sarana Produksi:	262,50	326,25	405,00	472,50	642,50	797,75
a. Bibit	62,60	75,00	87,50	125,00	150,00	175,00
b. Pupuk	105,00	131,25	157,50	172,50	216,50	352,75
c. Obat-obatan	95,00	120,00	160,00	175,00	230,00	270,00
2. Tenaga Kerja	633,50	706,50	754,00	1.225,50	1.382,50	1.475,00
3. Lainnya	30,00	30,00	30,00	45,00	45,00	45,00
II. Penerimaan (Rp. 000,-)	1170,00	1.350,00	1530,00	2.340,00	2.790,00	3.240,00
III. R/C	1,26	1,27	1,29	1,38	1,38	1,40
IV. Nilai Tukar Penerimaan						
1. Terhadap Saprodi	4,46	4,14	3,78	4,95	4,34	4,06
2. Terhadap Bibit	18,72	18,00	17,49	18,72	18,60	18,51
3. Terhadap Pupuk	11,14	10,29	9,71	13,57	10,63	9,18
4. Terhadap Obat-obatan	12,32	11,25	9,56	13,37	12,13	12,00
5. Terhadap Tenaga Kerja	1,85	1,91	2,03	1,91	2,28	2,20

Sumber: Analisa Data Primer.

Tabel 3: Analisis Nilai Tukar Penerimaan Komoditas Padi, Berdasarkan Tingkat Pendapatan dan Areal Garapan.

URAIAN	MK I 2010					
	Areal Garapan Sedang			Areal Garapan Luas		
	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi
I. Biaya (Rp. 000,-)	781,50	921,00	1039,50	1.478,75	1.733,00	2.097,00
1. Sarana Produksi:	263,00	326,00	398,00	458,75	592,50	756,50
a. Bibit	87,50	100,00	112,50	137,50	187,50	237,50
b. Pupuk	107,50	134,00	160,50	173,75	235,00	296,50
c. Obat-obatan	68,00	92,00	125,00	147,50	170,00	222,50
2. Tenaga Kerja	488,50	563,00	611,50	975,00	1.095,50	1.295,50
3. Lainnya	30,00	30,00	30,00	45,00	45,00	45,00
II. Penerimaan (Rp. 000,-)	990,00	1188,00	1332,00	2.106,00	2.304,00	2.610,00
III. R/C	1,27	1,29	1,28	1,42	1,33	1,24
IV. Nilai Tukar Penerimaan						
1. Terhadap Saprodi	3,76	3,64	3,46	4,59	3,89	3,45
2. Terhadap Bibit	11,31	11,88	11,84	15,32	12,29	10,99
3. Terhadap Pupuk	9,21	8,87	8,30	12,12	9,80	8,80
4. Terhadap Obat-obatan	14,46	12,91	10,66	14,28	13,55	11,73
5. Terhadap Tenaga Kerja	2,03	2,10	2,18	2,16	2,10	2,01

Sumber: Analisa Data Primer.

Tabel 4: Analisis Nilai Tukar Penerimaan Komoditas Padi Berdasarkan Areal Garapan.

URAIAN	MT II 2009		MT I 2010	
	Areal Garapan		Areal Garapan	
	Sedang	Luas	Sedang	Luas
I. Biaya (Rp. 000,-)	1.029,25	2.026,00	914,00	1.769,50
1. Sarana Produksi:	331,25	637,50	329,00	602,50
a. Bibit	75,00	150,00	100,00	187,50
b. Pupuk	131,25	262,50	134,00	235,00
c. Obat-obatan	125,00	225,00	95,00	180,00
2. Tenaga Kerja	698,00	1.343,00	555,00	1.122,00
3. Lainnya	30,00	45,00	30,00	45,00
II. Penerimaan (Rp. 000,-)	1.350,00	2.790,00	1.170,00	2.340,00
III. R/C	1,31	1,38	1,28	1,32
IV. Nilai Tukar Penerimaan				
1. Terhadap Saprodi	4,08	4,38	3,56	3,88
2. Terhadap Bibit	18,00	18,60	11,70	12,48
3. Terhadap Pupuk	10,29	10,63	8,73	9,96
4. Terhadap Obat-obatan	10,80	12,40	12,32	13,00
5. Terhadap Tenaga Kerja	1,93	2,08	2,11	2,09

Sumber: Analisa Data Primer.

dengan melihatnya berdasarkan tingkat pendapatan petani, yaitu: tingkat pendapatan rendah, sedang dan tinggi.

Rasio nilai tukar penerimaan terhadap saprodi dalam MT II 2009 pada petani dengan areal garapan sedang adalah pada tingkat pendapatan rendah (1,26 terhadap 4,46); pada tingkat pendapatan sedang (1,27 terhadap 4,14); dan pada tingkat pendapatan tinggi (1,29 terhadap 3,78). Pada petani dengan areal garapan luas, rasio nilai tukar penerimaan terhadap saprodi pada tingkat pendapatan

rendah adalah 1,34 terhadap 4,95; pada petani dengan tingkat pendapatan sedang (1,38 terhadap 4,34) dan pada petani dengan tingkat pendapatan tinggi adalah 1,40 terhadap 4,06.

Rasio nilai tukar penerimaan terhadap saprodi dalam MT I 2010, pada petani dengan areal garapan sedang adalah pada tingkat pendapatan rendah (1,27 terhadap 3,76); pada tingkat pendapatan sedang (1,29 terhadap 3,64); dan pada tingkat pendapatan tinggi (1,28 terhadap 3,46). Pada petani dengan areal garapan luas, rasio nilai tukar

penerimaan terhadap saprodi pada tingkat pendapatan rendah adalah 1,42 terhadap 4,59; pada petani dengan tingkat pendapatan sedang (1,33 terhadap 3,89) dan pada petani dengan tingkat pendapatan tinggi adalah 1,24 terhadap 3,45.

Untuk lebih singkatnya kedua tabel diatas dapat dirangkum dalam tabel 4 berikut agar dapat melihat perbandingan rasio nilai tukar penerimaan terhadap saprodi pada kedua musim tanam tersebut.

Selanjutnya dari tabel 4 tersebut, dapat diketahui bahwa rasio nilai tukar penerimaan terhadap saprodi (bibit, pupuk, obat-obatan) adalah lebih kecil pada petani areal garapan sedang (4,08) terhadap petani dengan areal garapan luas (4,38) untuk MT II 2009. Untuk MT I 2010 rasio nilai tukar penerimaan terhadap saprodi adalah lebih kecil pada petani areal garapan sedang (3,56) terhadap petani dengan areal garapan luas (3,88).

Nilai tukar penerimaan terhadap saprodi lebih besar dibanding nilai tukar penerimaan tenagakerja untuk areal garapan sedang dan luas. Hal ini menunjukkan bahwa biaya yang dikeluarkan petani untuk tenaga kerja jauh lebih besar daripada biaya untuk sarana produksi (baik untuk bibit, pupuk, maupun obat-obatan). Keadaan ini disebabkan oleh banyaknya tenagakerja upahan yang dipergunakan dan tingginya tingkat upah yang dikeluarkan.

Sementara itu dari dekomposisi nilai tukar penerimaan terhadap biaya saprodi menunjukkan bahwa nilai tukar penerimaan terhadap bibit lebih besar dibanding nilai tukar terhadap pupuk dan obat-obatan. Keadaan ini menunjukkan tingginya peningkatan harga pupuk dan obat-obatan dibanding harga bibit yang relatif stabil.

Dampak Kebijakan Pembangunan Pertanian Terhadap Harga Padi

Kebijakan pembangunan pertanian secara umum bertujuan untuk meningkatkan produksi dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus meningkatkan pendapatan petani. Kebijakan peningkatan produksi antara lain dilakukan melalui peningkatan intensifikasi dan penyediaan modal; sedang peningkatan pendapatan dilakukan melalui kebijakan harga yang meliputi kebijakan harga domestik dan kebijakan perdagangan.

Menurut Hadi (2000) yang dikutip Sutrisno dan Winarno (2000), berbagai kebijakan pemerintah dalam pengembangan komoditas pertanian seperti: 1) Program Pengembangan Agribisnis yang bertujuan meningkatkan pendapatan petani melalui peningkatan daya saing dengan cara peningkatan efisiensi manajemen usaha, penggunaan skala efisien dan pemilihan komoditas yang bernilai ekonomi yang berorientasi pasar domestik maupun ekspor; 2)

Program Ketahanan Pangan bertujuan agar masyarakat mampu menjangkau pola konsumsi yang baik dengan harga terjangkau melalui peningkatan produksi, produktivitas, pendapatan/kesejahteraan petani serta kesempatan kerja on-farm dan off-farm; 3) Program Rintisan Korporasi melalui pembinaan kerjasama ekonomi dalam kelompok tani melalui konsolidasi manajemen usaha tani dalam skala efisien usaha dan manajemen profesional untuk menciptakan nilai tambah sehingga efisiensi usaha dan daya saing komoditas dalam jangka panjang dapat meningkat.

Kebijakan pembangunan pertanian oleh pemerintah didekati dengan tingkat produksi, sedangkan dampak yang diamati adalah tingkat harga yang diterima petani, yang didasari bahwa harga berperan penting dalam pembentukan penerimaan/pendapatan dari usaha tani (Indraningsih, K. S et al, 2003)

Pemerintah menetapkan tarif impor cukup tinggi pada perdagangan semula bertujuan untuk: 1) melindungi produsen dalam negeri dari persaingan komoditas impor sejenis sekaligus mendorong petani meningkatkan produksinya; dan 2) menciptakan pendapatan pemerintah.

Kebijakan harga dasar padi pada dasarnya kebijakan pemerintah bias terhadap pengembangan padi untuk mempercepat peningkatan produksi (Sudaryanto, 1999), tetapi akhirnya kembali bias ke padi untuk mempercepat peningkatan produksi beras nasional.

SIMPULAN

Simpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: *Pertama*, pengaruh negatif di satu sisi dari krisis ekonomi yang dipicu oleh krisis moneter terhadap pertanian dan pedesaan antara lain seperti: meningkatkan pengangguran dan jumlah penduduk miskin; pengaruh positif di sisi lain adalah peningkatan harga komoditas pertanian karena meningkatnya nilai tukar mata uang asing.

Kedua, kenaikan harga produk yang dihasilkan petani lebih besar dari kenaikan harga barang yang dibeli, maka daya beli petani akan meningkat (mengindikasikan peningkatan kesejahteraan petani) yang diformulasikan dalam bentuk nilai tukar petani. *Ketiga*, kebijakan pemerintah di sector pertanian (kebijaksanaan harga, subsidi, perkreditan dan lainnya) mulai dari kegiatan usaha tani sampai pemasaran hasil secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi nilai tika petani. *Keempat*, peningkatan/perbaikan nilai tukar petani berkaitan erat dengan keagairahan petani berproduksi, dengan dampak ganda yaitu peningkatan partisipasi petani dan produksi pertanian serta menghidupkan perekonomian pedesaan, penciptaan

lapangan perkerjaan di pedesaan, yang berarti akan menciptakan sedikitnya keseimbangan pembangunan antar daerah dan antar wilayah serta optimalisasi sumberdaya nasional.

Kelima, faktor internal yang menyangkut sistem usaha tani yang berkaitan dengan keputusan petani dalam mengadopsi teknologi maupun permodalan yang mempengaruhi penggunaan saprodi, ini juga mempengaruhi nilai tukar penerimaan padi; di samping faktor eksternal. *Keenam*, sistem pemasaran sulit diantisipasi petani dimana tingkat penerimaan mereka sangat bergantung pada 'harga jual' yang diterima petani. 'Posisi tawar' petani yang lemah menempatkan petani pada situasi terpaksa menerima 'keputusan pasar', dengan tanpa atau sedikit sekali dilibatkan dalam penentuan harga; walaupun kenyataannya mereka berperan sebagai produsen. *Ketujuh*, Faktor sosial ekonomi turut sebagai faktor penentu tercapainya produktivitas dimana petani umumnya akan membandingkan kemudahan dan keuntungan yang akan diperoleh, terpenuhi atau tidaknya kebutuhan hidup bila ia lebih memilih menanam padi dibanding komoditas lain.

Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah: *Pertama*, pemerintah sebagaimana harapan petani hendaknya lebih mengantisipasi bagaimana pengarahannya memajukan pertanian tanaman pangan sebagai pendorong utama dalam memantapkan pertanian pangan sebagai penyedia bahan pangan yang mampu mendorong pertumbuhan perekonomian di pedesaan (terutama di masa krisis yang masih berlanjut sekarang ini). Hal ini mungkin dapat dicapai melalui perluasan pemasaran dan kebijaksanaan harga yang menguntungkan petani, maupun melalui mekanisme pertanian dan penanganan pasca panen. *Kedua*, dalam mengatasi kendala perluasan areal panen dan peningkatan produktivitas berkaitan erat dengan adopsi teknologi. Peningkatan adopsi teknologi dapat ditempuh antara lain dengan peningkatan penyuluhan dan pelatihan praktis sistem budidaya padi yang sesuai dengan kondisi agroekologi, tidak hanya berpatokan pada harus berjalannya suatu program pemerintah di bidang pertanian tanpa memperhatikan unsur petani dan kebutuhannya serta kondisi agroekologi yang berbeda antar wilayah.

Ketiga, memperbaiki sistem pasar yang bersifat monopoli dan sangat tergantung pada harga yang ditetapkan pedagang yang terasa sangat memberatkan para petani. Sekalipun penawaran dan permintaan relatif seimbang, namun membludaknya suplai padi dari luar negeri dengan komposisi kualitas yang relatif lebih baik kontinuitas dan kuantitas terjaga, dan lainnya merupakan syarat yang harusnya lebih

diperhatikan petani dengan penyuluhan dan bimbingan aktif dari pemerintah. *Keempat*, memberi perhatian/memperhitungkan faktor internal seperti sistem usaha tani terkait pada keputusan petani dalam mengadopsi teknologi, serta permodalan yang terkait penggunaan saprodi, ini juga mempengaruhi nilai tukar penerimaan padi; disamping faktor eksternal. *Kelima*, memperbaiki sistem pemasaran yang sering sulit diantisipasi petani, sehingga petani memiliki 'posisi tawar' yang memadai, terkait pada tingkat penerimaan mereka yang sangat bergantung pada 'harga jual' yang diterima petani. Petani diupayakan tidak selalu lemah atau selalu terpaksa menerima 'keputusan pasar', akan tetapi turut dilibatkan dalam penentuan harga; sebagai salah satu reward terhadap mereka dan perannya sebagai produsen.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, A. et al. 1991. Studi Kebijaksanaan Nilai Tukar Pertanian. Kerjasama PAE Dengan Departemen Ilmu-ilmu Sos.Ek. Fak.Pertanian. IPB. Bogor.
- BPS. 1989. Nilai Tukar Petani Jawa Madura (1983=100) dan sepuluh propinsi di Pulau Jawa (1987=100).2000. Propinsi Jawa Timur Dalam Angka.
- Chrisman, S., dkk. 1966. Ekonomi Kedelai di Indonesia. IPB. Press. Dinas Pertanian Provinsi Jambi. Laporan Tahunan. Diperta Dati I. Propinsi Jambi. 2000. Laporan Tahunan.
- Hendayana, R. Herlina T. 1995. Dimensi Perubahan Nilai Tukar Petani dan Faktor- Faktor yang Mempengaruhi. Prosiding Pengembangan Hasil Penelitian Kelembagaan dan Prospek Pengembangan Beberapa Komoditas Pertanian. Puslit Sos.Ek Pertanian. Bogor.
- Killick, T. 1981. Policy Economics. A Textbook of Applied Economics on Developing Countries. The English Language Book Society.
- Pramonosidhi. 1984. Tingkah Laku Tukar Komoditi Pertanian pada Tingkat Petani. Kerjasama PAE Univ. Satya Wacana. Salatiga.
- Sumarno et al. 1989. Analisis Kesenjangan Hasil Padi Jawa. Pusat Palawija. Sudaryanto, T. et al. 1999. Perkembangan kebijaksanaan Harga dan Perdagangan Komoditas Pertanian. Laporan Hasil Pengkajian. PSE. Bogor.
- Supriyati, M. Rachmat, K.S Indraningsih, Tj.Nurasa. Roosgandha Elizabeth, R.Sajuti. 2000. LHP. Studi Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Komoditas Pertanian Puslit Sos.Ek. Pertanian. Bogor.
- Timmer, C.P et al. 1083. Food Plicy Analysis. John Hopkins. Univ. Press. Baltimore. Tim peneliti. 1994. Studi Prospek dan Kendala Pengembangan Palawija (kedelai, jagung, ubikayu dan Kacang tanah). Puslitbangtan. Balitbangtan. Bogor.